



Volume I, No. 4 Juni 2010

MULTI SAINS

Jurnal Ilmiah

EKONOMI, HUKUM, PERTANIAN, TEKNIK
KEDOKTERAN, PENDIDIKAN,

KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA

Oleh : Dra. Ika Rosenta Purba, M.Si

THE ANALYSIS CHARACTERS IN AMERICAN PASTORAL NOVEL

Oleh : Dra. Mahyar Diana, M.Pd

PERBEDAAN SIFAT FISIK TANAH ENTISOL PADA PERTANIAN ORGANIK
DAN ANORGANIK

Oleh : Yanto Raya Tampubolon, MP

BERINVESTASI SAHAM DI PASAR MODAL DAN PENILAIAN SAHAM

Oleh : DR. Angelina

DAMPAK INVESTMENT OPPURTUNITY SET DAN PROFITABILITY
TERHADAP DIVIDEN TUNAI PADA PERUSAHAAN DI BURSA EFEK
INDONESIA

Oleh : Syafriadi, SE, MM

PERBERDAYAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DALAM UPAYA
KONKRIT MENGURANGI TINGKAT KEMISKINAN

Oleh : Elidawaty Purba, SE, M.Si

TANGGAPAN MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP ETIKA DAN MORAL
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Oleh : Sorta Netty Sitangga, SE, Ak

PERWUJUDAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PUBLIK MELALUI
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK SUATU SARANA GOOD GOVERNANCE

Oleh : Surya Darma Pardede, S.Pd, MM

DAMPAK DEBT TO EQUITY RATIO, CASH POSITION DAN RETURN ON
ASSETS (ROA) TERHADAP DIVIDEND PAYOUT RATIO (DPR)

Oleh: Rezekia Vaizal Simanungkalit, SE, MM

DAMPAK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
DALAM PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN

Oleh: Januar Y Purba, S. Si

PENINGKATAN KOMPETENSI DAYA SAING MANUSIA MELALUI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Oleh : Genting Siregar, S.Pd

PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN PENDEKATAN
LITERATUR

Oleh : Taufik Parinduri, SE

Jurnal Multi Sains

Jurnal menerima tulisan dari berbagai disiplin Ilmu, Ekonomi, Sosial Politik, Hukum, Pertanian dan Peternakan, Kesehatan, MIPA, Komputer, Teknologi, Pendidikan. Terbit 6 x setahun. Belum pernah dimuat di Jurnal lain.

Penasehat /

Penanggung Jawab : Drs. Harkim, M.Si

Pemimpin Redaksi : Januar Y. Purba, S.Si

Dewan Redaksi : Ir. Bridon Silaban, MBA

Jhonson BS. Rajagukguk, S.Sos

Ir. Melva Sitanggang, M.Si

Dr. Derlina Sinaga, MM

Manager Sirkulasi : Surya Darma Pardede, S.Pd, MM

Alamat Redaksi dan Tata Usaha :

Jln. William Iskandar Komp MMTTC Blok P No.8-10

Telp. 061-76288101, 7332093 Medan - Sumatera Utara

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1 pada kertas kuarto. Dewan redaksi berhak mengevaluasi dan melakukan perubahan terhadap naskah yang masuk untuk keragaman format tanpa mengubah maksud dan isinya. Tulisan yang tidak dimuat akan dikembalikan kepada penulis untuk diadakan penyempurnaan.

Isi diluar tanggung jawab Penasehat/ Penanggung Jawab dan Pemimpin Redaksi.

Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan

JURNAL MULTI SAINS

Volume I, No. 4 Juni 2010

DAFTAR ISI

- KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA	
Oleh : Dra. Ika Rosenta Purba, M.Si.....	1 - 10 ✓
- THE ANALYSIS CHARACTERS IN AMERICAN PASTORAL NOVEL	
Oleh : Dra. Mahyar Diana, M.Pd.....	12 - 24
- PERBEDAAN SIFAT FISIK TANAH ENTISOL PADA PERTANIAN ORGANIK DAN ANORGANIK	
Oleh : Yanto Raya Tampubolon, MP... ..	25 - 33
- BERINVESTASI DI PASAR MODAL DAN PENILAIAN SAHAM	
Oleh : DR. Angelina	34 - 44
- DAMPAK <i>INVESTMENT OPPORTUNITY SET</i> DAN <i>PROFITABILTY</i> TERHADAP DEVIDEN TUNAI PADA PERUSAHAAN DI BURSA EFEK INDONESIA	
Oleh : Syafriadi, SE.MM.....	45 - 53
- PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DALAM UPAYA KONKRIT MENGURANGI KEMISKINAN	
Oleh : Elidawati Purba, SE.M.Si	54 - 70
- TANGGAPAN MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP ETIKA DAN MORAL PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	
oleh : Sorta Netty Sitanggang, SE. Ak	71 - 80
- PERWUJUDAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PUBLIK MELALUI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK SUATU SARANA GOOD GOVERNANCE	
Oleh : Surya Darma Pardede, S.Pd.MM.....	81 - 100
- DAMPAK DEBT TO EQUITY RATIO, CASH POSITION DAN RETRUN ON ASSETS (ROA) TERHADAP DEVIDEND PAYOUT RATIO (DPR)	
Oleh : Rezekia Vaizal Simanungkalit, SE.MM.....	101 - 110
- DAMPAK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DALAM PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN	
Oleh : Januar Y. Purba, S.Si.....	111 - 121
- PENINGKATAN KOMPETENSI DAYA SAING MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
Oleh : Ginting Siregar, S.Pd.....	122 - 136
- PERTANGGUNG JAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN PENDEKATAN LITERATUR	
Oleh : Taufik Parinduri, SE.....	137 - 148

KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA

Oleh :

Dra. Ika Rosenta Purba, M.Si

Dosen Universitas Simalungun, P. Siantar

Abstrak

Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pengelolaan lingkungan dan sumber daya. Metode penulisan menggunakan metode library research. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa konservasi dan pembangunan berkelanjutan adalah kiblat akal. Ini berarti bahwa di pihak pemerintah kiblat ini harus dijabarkan menjadi suatu niat politik pangkah (*consistent*) untuk menciptakan suatu keadaan sosio-ekonomi yang membantu menumbuhkan pandangan percaya diri akan haridepan semua orang. Nalarnya harus dicari dalam kompatibilitas berfikir antar golongan kepentingan yang berbeda. Dalam banyak hal, terutama di negara-negara sedang berkembang, memapankan konservasi dan mencapai pembangunan berkelanjutan memerlukan reformasi kelembagaan. Hal ini dapat melibatkan pemikiran ulang tentang nilai-nilai sosial dan tata hidup.

Kata kunci : *pengelolaan, lingkungan dan sumber daya*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Lingkungan hidup dan pengelolannya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal-pasal terpenting berkenaan dengan kebijakan tata ruang ialah pasal 1 tentang batasan pengertian, pasal 2 tentang ruang lingkup, pasal 3 mengenai asas dan pasal 4 mengenai tujuan pengelolaan lingkungan hidup, dan pasal 5 tentang hak dan kewajiban orang akan lingkungan hidup. Pasal-pasal tersebut dapat diintisarikan sebagai berikut.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk

hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (pasal 1 butir 1). Penjelasannya mengatakan bahwa lingkungan hidup merupakan sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, alam nonhayati, buatan dan sosial.

Lingkungan hidup Indonesia berdasarkan wawasan nusantara beruang lingkup meliputi ruang, tempat Negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat serta yurisdiksinya (pasal 2). Dalam penjelasan umum dikatakan bahwa lingkungan hidup Indonesia merupakan pengertian hukum dan politik. Pengelolaan lingkungan hidup

adalah upaya terpadu memanfaatkan, menata, memelihara, mengawasi, mengendalikan, memulihkan dan mengembangkan lingkungan hidup (pasal 1 butir 2).

Asas pengelolaan lingkungan hidup ialah pelestarian kemampuan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia (pasal 3). Penjelasan menyebutkan bahwa keserasian dan keseimbangan lingkungan menjadi prasarat bagi pencapaian kehidupan optimum. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup ialah penyelarasan hubungan manusia dengan lingkungan hidup, pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana, keterlaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang, perlindungan negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, dan perwujudan manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup (pasal 4 butir a s.d. e). Dalam penjelasan disebutkan bahwa kebijaksanaan memanfaatkan sumberdaya perlu memperhatikan aspek-aspek-aspek a.l. kehematan, daya guna, hasil guna dan daur ulang.

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan bersamaan dengan itu berkewajiban memelihara ling-

kungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya (pasal 5 butir 1 dan 2).

1.2. Tujuan Penulisan

Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pengelolaan lingkungan dan sumber daya.

2. Uraian Teoritis

2.1. Pengertian Lingkungan

Dalam AMDAL di Negeri Belanda, istilah lingkungan digunakan menurut dua pengertian. Dalam peraturan perundangan lingkungan diberi arti "keseluruhan air, tanah, udara, manusia, hewan, tumbuhan, barang beserta nasabah antar masing-masing". Kalau menyangkut satu jenis makhluk, pengertian lingkungan ialah "keseluruhan faktor yang dapat berpengaruh atas hidup suatu jenis makhluk" (Anon., 1987).

Di dalam Ketentuan Umum Undang-Undang R.I. Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah "kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya". Pengertian ini mirip dengan yang digunakan dalam peraturan perundangan

Negeri Belanda, dan menyiratkan pengertian ekosistem.

Makalah ini menggunakan istilah lingkungan yang menyiratkan pengertian ekosistem. Dengan demikian maka pengelolaan lingkungan bermakna pengaturan keadaan komponen lingkungan masing-masing dan saling nasabahnya untuk memperoleh masalah sebaik-baiknya secara berkelanjutan bagi perikehidupan manusia. Menurut tinjauan produksi, istilah lingkungan dapat dipadankan dengan istilah lahan. Lahan ialah keseluruhan lingkungan alamiah dan budaya yang di dalamnya dilangsungkan kegiatan berproduksi (Sopher & Baird, 1978).

2.2. Sumberdaya Alam

Kecuali manusia dan hasil rekayasannya yang menyatu dengan lingkungan, komponen lingkungan lainnya disebut sumberdaya alam. Sumberdaya alam ialah segala sesuatu persediaan bahan atau barang alamiah yang dalam keadaan sebagaimana ditemukan diperlukan manusia (Randall, 1987), atau yang dengan suatu upaya tertentu dapat dibuat bermanfaat bagi manusia (Menard, 1974). Dalam keadaan mentah, sumberdaya dapat menjadi masukan ke dalam proses menghasilkan sesuatu yang berharga, atau dapat memasuki proses konsumsi secara langsung sehingga mempunyai harga (Randall, 1987).

Menurut pandangan ekonomi, sumberdaya ditakrifkan dengan konsep keterbatasan (*scarcity*). Sesuatu yang tidak terbatas bukan sumberdaya. Sumberdaya bermatra ganda, yaitu kuantitas, kualitas, waktu dan ruang (Randall, 1987).

Menurut bahan penyusunnya, sumberdaya alam terpilahkan menjadi sumberdaya mineral (air, tanah, udara, cebakan bahan tambang, cebakan energi) dan sumberdaya hayati (masyarakat hewan dan tumbuhan). Menurut perilakunya pada penggunaan lumrah, ada sumberdaya yang bersifat terbarukan (air, tanah, udara, masyarakat hewan dan tumbuhan) dan ada yang bersifat takterbarukan (cebakan bahan tambang dan energi nuklir). Akan tetapi pada penggunaan lewat batas, sumberdaya terbarukan dapat berperilaku takterbarukan dalam hitungan waktu generasi manusia, karena laju penggunaan melampaui laju pemugaran diri sumberdaya alam berangkutan.

2.3. Pengertian Keterlanjutan

The World Conservation Strategy tahun 1980 telah menakrifkan konsep pembangunan berkelanjutan sebagai "pembangunan yang memenuhi kebutuhan kini tanpa menutup kemungkinan generasi mendatang memenuhi kebutuhan mereka" (SCOPE, 1990). Konsep ini dapat dijabarkan dengan diberi konotasi ekonomi

menjadi "suatu pola pertumbuhan ekonomi yang memenuhi kebutuhan kebendaan kini tanpa memberikan dampak negatif kepada sumberdaya fisik yang ada, yang acapkali berjumlah dan berkemampuan terbatas, sehingga tidak membahayakan kapasitas dan potensi pembangunan masadepan untuk memuaskan aspirasi kebendaan dan kelingkungan generasi mendatang" (Shindo, 1990).

Konservasi merupakan suatu faktor keterlanjutan yang mutlak. Dalam hal sumberdaya terbarukan, konservasi menjamin kemalaran (*continuous*) berfungsi sumberdaya tersebut. Tujuan ini dapat dicapai lewat penggalakan semua proses mendaur alami dan perekaan teknik pendaurulanan limbah dan sisa produksi. Dalam hal sumberdaya takterbarukan, konservasi memperpanjang umur berguna sumberdaya dengan jalan mengekonomiskan dan menganekaragamkan penggunaannya.

2.4. Konsep Konservasi

Sehubungan dengan sumberdaya terbarukan, konservasi berarti menjaga sumberdaya menurut asas yang akan menjamin secara abadi manfaat ekonomi, sosial dan psikologi setinggi-tingginya bagi masyarakat (disadur dari Donahue dkk., 1977). Jadi, konservasi berkaitan dengan fungsi. Hal ini berbeda secara mendasar dengan preservasi yang bertujuan

mempertahankan bentuk.

Apa yang perlu dikonservasi dan bagaimana menjalankannya bergantung pada fungsi yang diharapkan dilangsungkan oleh sumberdaya bersangkutan. Sumberdaya lahan untuk pertanian memerlukan tindakan konservasi yang berbeda dengan misalnya lahan untuk perumahan. Perbedaan kebutuhan akan konservasi dapat menyebabkan terbuatnya rencana-rencana yang saling tidak serasi, bahkan penerapan yang saling berlawanan. Untuk menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan dan untuk menjamin pengamanan sumberdaya secara efektif dari pengurusan dan pemburukan, konservasi harus menjadi bagian dari suatu hampiran bernalar terhadap penggunaan sumberdaya (Hudson & Notohadiprawiro, 1983).

Konservasi merupakan suatu tindakan yang terencana dan terkoordinasi. Konsep konservasi dan keterlanjutan mengandung petunjuk bahwa pengelolaan ruang dan waktu mendasari segala kehendak atau kegiatan. Perbedaan kesudahan dari penerapan sistem atau teknik konservasi yang berbeda dapat dikatakan karena perbedaan kecocokan sistem atau teknik untuk mengelola ruang dan waktu secara benar. Budjang dkk. (1990) telah mengajukan suatu postulat, berdasarkan pengamatan etnologi mereka di Jambi, bahwa

konservasi dan pembangunan berkelanjutan ditentukan oleh kecenderungan perubahan teknologi tradisional ke teknologi modern. Di dalam konteks pengelolaan ruang dan waktu, konotasi "tradisional" dan "modern" hendaknya diperbandingkan menurut cara mengenali ruang dan waktu.

3. Pembahasan

3.1. Pengelolaan Lingkungan

Tekanan atas sumberdaya alam untuk memperoleh bahan-bahan kebutuhan manusia, khususnya atas lahan untuk produksi bahan pangan dan sandang, sebagai konsekuensi pertumbuhan penduduk yang meningkat dan harapan ekonomi yang melambung, membebani berat lingkungan asli. Keprihatinan kembar mengenai pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan rupanya tidak terkawinkan dan tidak tertangani. Akan tetapi persoalan ini dapat diselesaikan apabila pengelolaan wilayah mengikuti suatu hampiran menyatu melalui perencanaan bersama oleh semua sektor yang berkepentingan, seperti pertanian, kehutanan, industri dan kependudukan, berdasarkan asas ekosistem. Cekaman regional di wilayah-wilayah pembangunan yang melaju cepat dapat dikurangi dengan pengelolaan yang menggunakan hampiran regional dan menerapkan kebijakan regional pada penggunaan lingkungan

(Anom., 1990a).

Pengelolaan regional dengan hampiran menyatu dan perencanaan bersama dengan asas ekosistem memerlukan jbaran operasional dengan kriteria yang memungkinkan campur tangan teknis, sosial, ekonomi dan politik dapat dirancang untuk mencapai keterlanjutan. Untuk ini masyarakat harus merumuskan kebijakan dan campur tangan yang memenuhi empat kriteria dasar, yaitu (1) efisiensi ekonomi, (2) keadilan, (3) kesehatan lingkungan, dan (4) berdikari (*endogenous and selfreliant*) (Anon., 1990b).

Lingkungan sebagai suatu sistem sumberdaya alam tergunkan untuk lima macam kiblats layanan pokok: (1) bertujuan ekstraktif (penambangan, penggalian), (2) sumber masukan untuk proses produksi hayati (pertanian, kehutanan, dll.), (3) menyediakan ruang (perumahan, kawasan industri, jalan, dll.), (4) sumberdaya gen dan cagar peninggalan alam, dan (5) sanitasi dan penyehatan (pembuangan limbah, taman, dll.). Kiblats layanan bermacam-macam ini saling meniadakan (*mutually exclusive*) menurut pendudukan ruang. Ketiadaan kompatibilitas ruang antar kiblats layanan menjadi akar perbenturan penggunaan lingkungan yang seringkali berkembang menjadi sangat sengit, mengarah ke pembangunan wilayah yang tidak berkelanjutan. Persaingan

ruang bahkan timbul pula antar bentuk penggunaan di dalam kiblat layanan yang sama, misalnya antara pertanaman pangan dan hutan, antara perumahan dan kawasan industri, dsb.

Untuk meredakan perbenturan kepentingan, pemanfaatan lingkungan perlu berkiblat kepada empat asas: (1) kematapan, (2) kefaedahan optimum bagi berbagai kepentingan dengan imbalan adil, (3) keterpaduan pengembangan menurut konsep saling bernasabah antar bagian lingkungan, membentuk suatu persinambung (*continuum*), khususnya antara bagian hulu yang berlaku sebagai daerah atasan (*commanding area*) dan bagian hilir yang berlaku sebagai daerah bawahan (*commaded area*), dan (4) kelangsungan fungsi lindung dan produksi secara berkelanjutan berdasarkan kompatibilitas kinerja (*compatibility of performance*).

Kebutuhan akan layanan yang hendaknya dijalankan oleh lingkungan dapat berbeda dari tempat ke tempat, dan dari waktu ke waktu. Perbedaan antar tempat sebagainya ditentukan oleh pandangan terhadap lingkungan dan sebagiannya lagi ditentukan oleh apa yang disebut loka kesempatan (*locus of opportunities*), yaitu pilihan-pilihan yang tersedia sehubungan dengan suatu pendapatan tertentu (Alonso, -). Kesesuaian lingkungan merupakan faktor loka

kesempatan yang kuat. Perbedaan antar waktu muncul karena sasaran ekonomi, keinginan sosial dan aspirasi politik bergantung pada waktu. Maka penggunaan lingkungan merupakan suatu konsep dinamis mengenai pendudukan lingkungan untuk suatu maksud tertentu, yang spesifikasinya bermatra ruang dan waktu. Fakta ini perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan.

Penggunaan lingkungan dapat difahami sebagai suatu pengaturan keruangan atau ketentuan mengenai pendudukan lingkungan. Pertanaman lorong, waduk untuk memasok air irigasi kepada daerah bawahannya, dan jalur-jalur hijau di dalam daerah permukiman, adalah contoh-contoh pengaturan keruangan penggunaan lingkungan. Misal-misal pengaturan kewaktuan penggunaan lingkungan ialah perladangan, pergiliran tanaman, dan reklamasi hamparan penimbunan tahi tambang (*mine tailings*) untuk dijadikan lahan pertanaman. Perladangan dan pertanaman bergilir merupakan contoh penggunaan lingkungan berulang, sedang reklamasi timbunan tahi tambang adalah urutan penggunaan yang tidak berbalik atau satu arah.

Sebagai suatu sistem sumberdaya, atau pembawa ekosistem, harkat lingkungan selalu berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan manusia. Oleh karena itu harkat

lingkungan tidak dapat dinilai semata-mata atas dasar ciri-ciri biofisiknya. Harkatnya sangat ditentukan oleh syarat-syarat sosial, perspektif ekonomi dan pertimbangan politik. Istilah lingkungan selalu berkonotasi sosio-ekonomi dan budaya.

Pengelolaan lingkungan tidak lain daripada pengelolaan sumberdaya secara terpadu. Sifat sumberdaya menurut bahan penyusunnya dan menurut perilakunya pada penggunaan perlu diperhatikan dalam menetapkan cara pengelolaan lingkungan yang memadai. Oleh karena macam, ketersediaan dan kemampuan sumberdaya yang ada di suatu wilayah dapat berbeda dengan yang ada di wilayah lain, dan karena kepentingan suatu sumberdaya bagi manusia dapat berubah dari waktu ke waktu, sistem pengelolaan lingkungan perlu memiliki kekhasan waktu dan ruang.

3.2. Beberapa Pengenal Lazim Pengelolaan Sumberdaya

Kebanyakan persoalan pemutusan penggunaan sumberdaya, pengelolaan, dan konservasi harus diselesaikan dalam konteks rumit. Beberapa pengenal (*attributes*) konteks tersebut ialah (Randall, 1987):

1. Sumberdaya yang menjadi perhatian jangka dekat merupakan komponen sistem yang sangat rumit. Upaya mengubah

suatu komponen akan menimbulkan perubahan di tempat lain dalam sistem tersebut. Pengertian manusia mengenai sistem ini masih sangat terbatas sekali, sehingga penghubungan sebab dengan akibat menjadi sulit. Maka muncul penggunaan istilah-istilah "tumpahan" (*spillovers*), "akibat sampingan", atau "akibat tidak disengaja" yang menggambarkan betapa terbatasnya pemahaman manusia tentang konsep sistem sumberdaya.

2. Kebanyakan jalur tindakan alternatif mempunyai konsekuensi yang dipandang menguntungkan dan merugikan. Karena keterbatasan dasar pengetahuan maka sesuatu yang dinyatakan menguntungkan oleh seseorang dapat dianggap merugikan oleh orang lain.
3. Setiap keputusan akan mempengaruhi orang banyak, yang merasakan akibatnya secara berbeda-beda dan yang kuasa peransertanya dalam membuat keputusan beraneka sekali.
4. Di dalam setiap masyarakat, keputusan yang berkaitan dengan sumberdaya, baik yang dibuat oleh badan swasta maupun oleh badan pemerintah, merupakan hasil suatu struktur kelembagaan rumit yang menetapkan hak dan tanggung jawab hukum dan dengan de-

mikian memapankan struktur perangsang. Struktur kelembagaan itu bersifat dinamis, bermekanisme adaptif, disamping bermekanisme konservatif demi kelangsungannya. Maka keputusan pun dapat berubah dalam kaitannya dengan hak dan tanggung jawab hukum serta struktur perangsang yang diharapkan kepada perorangan anggota masyarakat, dan pada gilirannya akan mengubah keputusan yang dibuat para anggota masyarakat.

Persoalan kebijakan peruntukan sumberdaya bersifat rumit karena mengurus sistem fisik dan biologi yang memang rumit dan yang harus diselesaikan di dalam lingkungan sosial dan kelembagaan yang memang rumit pula. Timbul saling pertentangan antar tujuan yang sama-sama sah.

3.3. Keharusan Pelembagaan Kebijakan

Perencanaan dan koordinasi merupakan soal-soal kelembagaan, bilamana kegiatan tersebut berkaitan dengan ujud-ujud yang memakan ruang dan waktu. Telah dikemukakan bahwa harkat wilayah ruang-waktu sangat dipengaruhi oleh persyaratan sosial, perspektif ekonomi dan pertimbangan politik. Maka dari itu konservasi dan fungsi berkelanjutan hanya dapat dicapai dengan tindakan yang terlembaga baik. Taylor

(1980) merangkum unsur-unsur lembaga sebagai berikut: (1) tindakan bersama dalam pembatasan, pembebanan dan perluasan tindakan perorangan (takrif Commons), (2) seperangkat kaidah berperilaku yang mengendalikan suatu pola tindakan dan hubungan khusus (takrif Ruttan), dan (3) melibatkan nilai, keyakinan dan perspektif sosial-psikologi-politik yang mempengaruhi perilaku orang (takrif Wengert). Penataan kelembagaan di dalam rangka pembangunan berkelanjutan dimaksudkan memenuhi fungsi-fungsi (1) mengadakan sesuatu keaturan dalam acara kerja, (2) mendirikan sistem penyampaian untuk (a) menyalurkan informasi inovatif kepada masyarakat, (b) membuka komunikasi menuju ke pembangkitan peranserta masyarakat swaniat (*self-motivated*), dan (c) memasukkan bantuan teknis dan dukungan dana ke daerah pedesaan, (3) memajukan upaya meringankan keadaan terlangkahi (*bypassed conditions*) di daerah pedesaan, dan (4) memajukan sistem bapak-angkat dalam masalah pedesaan untuk meningkatkan citra politik masyarakat pedesaan.

Langkah-langkah tersebut dimaksudkan mengimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial, dan melengkapi keputusan dari atas dengan keinginan dari bawah. Pengaturan kelembagaan adalah pokok dari

keberhasilan pembangunan karena hal itu menyediakan prasarana bagi pengambilan langkah yang berurutan dalam perencanaan dan pelaksanaan.

Konservasi lahan merupakan investasi jangka panjang dalam pengembangan lahan. Skala waktunya lebih panjang daripada yang dapat berlaku pada petani kecil. Orang dengan keluarga lapar tidak mempunyai waktu untuk mengkhawatirkan berapa banyak tanah yang tertinggal dalam waktu satu pelita. Berkaitan dengan ini timbul pertanyaan siapa yang harus membayar biaya konservasi. Ini sulit dijawab. Dapat dijawab negara yang berwajib menanggungnya karena konservasi sumberdaya menyangkut kepentingan seluruh bangsa. Juga tidak masuk akal mengharapkan petani kecil membayar sekarang untuk mempertahankan lahan bagi keturunannya, suatu kemewahan yang dia tidak dapat menanggungnya. Jawaban lawannya ialah tidak akan adil mengharuskan penduduk kota atau pengusaha industri membayar bagi perbaikan nasib petani. Diperlukan suatu penyelesaian kompromi antara kedua jawaban ekstrim tadi, dan ini sekali lagi adalah soal kelembagaan (Hudson & Notohadiprawiro, 1983).

4. Penutup

Konservasi dan pembangunan berkelanjutan adalah kiblat

akal. Ini berarti bahwa di pihak pemerintah kiblat ini harus dijabarkan menjadi suatu niat politik panggah (*consistent*) untuk menciptakan suatu keadaan sosio-ekonomi yang membantu menumbuhkan pandangan percaya diri akan haridepan semua orang. Nalarnya harus dicari dalam kompatibilitas berfikir antar golongan kepentingan yang berbeda. Dalam banyak hal, terutama di negara-negara sedang berkembang, memapankan konservasi dan mencapai pembangunan berkelanjutan memerlukan reformasi kelembagaan. Hal ini dapat melibatkan pemikiran ulang tentang nilai-nilai sosial dan tata hidup.

Daftar Pustaka

- Alonz, W. -. Location and land use. East-West Center Editions. Honolulu. 204 h.
- Anon. 1987. Milieu-effectrap portage. 23 Effectvoorspelling. V Planten, dieren en ecosys-temen. Ministerie van Volks-huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer & Ministerie van Landbouw en Visserij. 's-Gravenhage. Vi + 213 h.
- Anon. 1990a. Recent approaches and methods for sustainable use of land in Latin America. SCOPE Nwesletter (34): 1-2.

- Anon. 1990b. Scientific information for sustainable development. SCOPE Newsletter (33):4-5.
- Budjang, I., A. Rasyid, & B. Rachman. 1990. Peralatan produksi tradisional dan perkembangannya di daerah Jambi. Dep. P & K. Jakarta. x + 144 h.
- Donahue, R.L. , R.W. Miller, & J.C. Shickluna. 1977. Soils. Prentice - Hall, Inc. Englewood Cliffs. Xiv + 626 h.
- Hudson, N., & T. Notohadiprawiro. 1983. Soil and water conservation. Dalam: Watershed Assessment Team, Composite Report. GOI-USAID. Vol. II, Technical Appendix III. 54 h.
- Menard, H.W. 1974. Geology, resources, and society. W.H. Freeman and Company. San Fransisco. Xi + 621 h.
- Randall, A. 1987. Resource economics. John Wiley & Son. New York. xiii + 434 h.
- SCOPE. 1990. SCOPE scientific programme 1990-1991. SCOPE Newsletter (33):1-3.
- Shindo, S. 1990. Environment and development. Editorial Palawija Nwes 7(3):3.
- Sopher, C.D., & J.V. Baird. 1978. Soil and soil management. Reston Publ o. Co., Inc. Reston. Xvi + 238 h.
- Taylor, D.C. 1980. Institutional constraints and farm management research. Dalam: B.T. Tan, K. Adulavidhaya, I.J. Singh, J.C. Flin, & S.E. Ong (eds.), Improving Farm Management Teaching in Asia. ADC, Inc. Bangkok. H 7-13.
- Undang-Undang R.I. Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.